

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MEMBERIKAN PERANAN PENTING BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU, JAKARTA)

Heriyanti
Universitas Esa Unggul, Jakarta
Heriyanti@Esaunggul.Ac.Id

ABSTRAK

Masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, dihadapkan langsung pada kondisi ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Permasalahan yang terjadi pada masyarakat pesisir karena proses komunikasi pembangunan yang belum berlangsung secara simultan, dan nelayan dihadapkan pada persoalan klasik seperti hasil tangkapan yang bervariasi, keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan, pasar dan program penyuluhan yang belum berjalan sesuai harapan. Program komunikasi yang dilakukan dalam penelitian adalah peningkatan keterampilan nelayan dan keluarganya dalam mengelola hasil tangkapan, memperbaiki sikap yang merusak lingkungan dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam, peningkatan kemampuan manajemen usaha penangkapan dan diversifikasi usaha yang disertai penguatan ekonomi keluarga melalui usaha produktif, pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan mengedepankan prinsip sustainability dan kesejahteraan masyarakat, membangun jejaring dengan mitra usaha guna memperbesar armada dan menggunakan alat tangkap yang lebih efektif dan tidak merusak lingkungan. Peran penting komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir adalah menjembatani kesenjangan yang terjadi antara kondisi masyarakat saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai melalui proses komunikasi yang partisipatif, dialogis dan memotivasi.

Kata Kunci : Proses komunikasi yang partisipatif, dialogis dan memotivasi

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau mencapai kurang lebih 17.500 buah dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar. Sebagai negara kepulauan, tidaklah mengherankan jika lebih kurang dua pertiga dari teritorial negara kesatuan yang berbentuk republik ini merupakan perairan, dengan luas lebih kurang 5,8 juta km². Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada yang mencapai lebih kurang 81.000 km.

Penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar kelima di dunia, yaitu lebih kurang 220 juta jiwa. Dan, lebih kurang 60 persen diantaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir. Sebagian besar diantaranya menggantungkan hidup kepada keberadaan sumberdaya alam pesisir dan lautan. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian besar kegiatan dan aktivitas sehari-harinya selalu berkaitan dengan keberadaan sumberdaya di sekitarnya.

Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu pulau yang sebagian besar wilayahnya (62%) merupakan perairan laut, selat dan teluk; sedangkan 38 % lainnya adalah daratan yang didalamnya juga

memuat kandungan air tawar dalam bentuk sungai, danau, rawa, dan waduk.

Demikian luasnya wilayah laut di Indonesia sehingga mendorong masyarakat yang hidup di sekitar wilayah laut memanfaatkan sumber kelautan sebagai tumpuan hidupnya. Ketergantungan masyarakat terhadap sektor kelautan ini memberikan identitas tersendiri sebagai masyarakat pesisir dengan pola hidup dan karakteristik tersendiri.

Masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas, dihadapkan langsung pada kondisi ekosistem yang keras, dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut (selanjutnya disingkat SDP). Masyarakat pesisir terutama *nelayan kecil*, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan dan keterbelakangan. Terdapat persoalan tertentu terkait dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga masyarakat pesisir masih tertinggal (Hanson 1984). Rendahnya taraf hidup masyarakat pesisir dan akses yang terbatas akan aset dan sumber-sumber pembiayaan bagi nelayan kecil merupakan persoalan utama yang dijumpai di kawasan pesisir. Nelayan pun sangat rentan terhadap tekanan pemilik modal.

Kegiatan pembangunan di kawasan pesisir tidak terlepas dari daya dukung lingkungan, keberlangsungan sumberdaya alam dan dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak terkait dengan menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ketersediaan sumberdaya alam di daratan

seperti hutan, bahan tambang, dan mineral serta lahan pertanian produktif semakin menipis sedangkan kebutuhan penduduk terus bertambah sejalan dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dan diprediksikan akan mencapai 252.370.792 juta jiwa pada tahun 2015. Kebutuhan penduduk tersebut tidak akan mampu dipenuhi seluruhnya oleh sumberdaya alam di daratan (Dahuri 2000) mengingat luas daratan Indonesia hanya sepertiga dari luasa Indonesia keseluruhan, yaitu 1.926.337 Km². Sektor perikanan dan kelautan sangat potensial untuk dikembangkan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Kegiatan sektor perikanan dan kelautan, memiliki dua bidang usaha (Amanah dan Yulianto 2002) yaitu perikanan darat dan perikanan tangkap. Hasil penelitian tentang pendekatan penyuluhan pada masyarakat pesisir (Amanah *et al.* 2004) memperlihatkan bahwa setiap komunitas memiliki keunikan dan berbeda dalam hal nilai, orientasi, dan kebutuhan pengembangan diri, kelompok, komunitas, serta daya dukung lingkungan fisik. Dalam hal ini komunikasi pembangunan dapat menjadi wahana transformasi situasi masyarakat dari sekarang ke kondisi yang lebih baik.

Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki luas total wilayah darat sebesar 8,32 km² dan wilayah laut seluas 6.997,50 km². Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki potensi sangat besar, terutama jika dilihat dalam pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita yang merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah kepulauan seribu dalam jangka waktu per tahun. Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki pendapatan produk domestik regional bruto per kapita terbesar kedua setelah Jakarta Pusat. Namun potensi yang besar tersebut ternyata wilayah Kepulauan Seribu memiliki penduduk miskin terbesar di wilayah DKI Jakarta.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bahwa proses-proses komunikasi pembangunan belum berlangsung simultan, dan nelayan masih dihadapkan pada persoalan klasik seperti hasil tangkapan yang bervariasi, keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan, pasar, dan program penyuluhan yang belum berjalan sesuai harapan. Tanpa strategi komunikasi pembangunan yang jitu, masyarakat pesisir akan makin tertinggal. Terdapat beberapa program andalan

pemerintah dalam konteks komunikasi pembangunan, namun belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan peran komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan komunitas, Studi kasus Kabupaten Kepulauan Seribu.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah (1) mendeskripsikan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir, khususnya komunitas nelayan; dan (2) menganalisis peran dan strategi alternatif komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

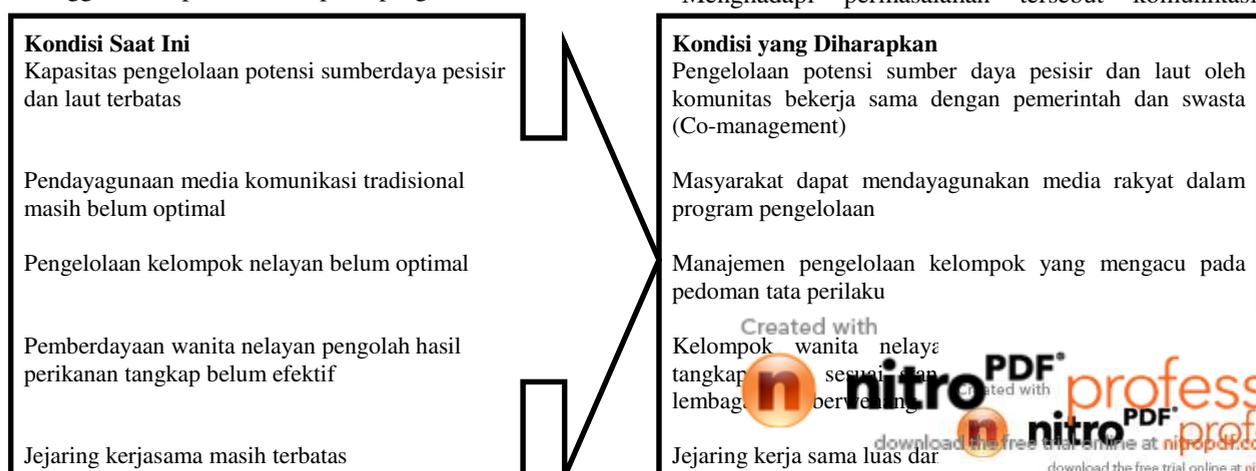
1.3 Kegunaan

Bagi pengambil kebijakan di bidang pengembangan masyarakat pesisir, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi dalam pengembangan masyarakat pesisir melalui pendekatan dan strategi komunikasi yang efektif.

2. Perumusan Masalah

Masalah merupakan faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Dalam konteks masyarakat pesisir dolokasi kajian, ada kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan (gambar 1). Secara konseptual, komunikasi pembangunan berperan menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi yang diharapkan

Nelayan di Kepulauan seribu menggunakan alat tangkap jaring untuk menangkap ikan, Kabupaten Kepulauan Seribu membuat budidaya rumput laut (merupakan salah satu komoditas hasil laut yang penting dan memiliki nilai ekonomis sebagai bahan pangan, bahan baku industri obat-obatan, tekstil, minuman, kosmetik dan pasta gigi) Sayangnya hasil nelayan baik tangkapan dan hasil budidaya rumput laut mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masyarakat pesisir keterbatasan aset, akses, dan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Upaya meningkatkan kualitas hidup nelayan kecil sulit terwujud tanpa adanya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia. Menghadapi permasalahan tersebut komunikasi



Gambar 1. Kesenjangan Kondisi yang Dihadapi Masyarakat P

pembangunan diperlukan peran utamanya sebagai sebuah proses yang dialogis dalam penyampaian ide, informasi, dan inovasi, oleh pihak-pihak terkait guna menunjang terjadinya proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan tersebut dampaknya dapat dilihat pada tingkat individu, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat yang lebih luas. Proses-prose komunikasi pembangunan memiliki dampak luas apabila dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan.

3. Konsepsi dan Hasil penelitian terdahulu tentang Komunikasi Pembangunan dan pemberdayaan.

3.1 Komunikasi Pembangunan

Nasution (2004) mengutip pernyataan Hedebro tentang tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya. Ketiga aspek komunikasi (1) pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan peran media massa menyumbang upaya tersebut. Dalam studi ini digunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat umum, (2) Pendekatan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun lebih spesifik persoalan utama dalam studi ini adalah penggunaan media agar dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa. (3) Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Studi ini mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru.

Haris (1996) menyatakan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif perlu dikembangkan untuk mengembangkan masyarakat di tingkat bawah melalui pendekatan pendidikan non formal. Terkait dengan pendekatan pembangunan yang diterapkan di Indonesia, Waskita (2005) mencermati bahwa pembangunan sampai saat ini masih terlalu berfokus pada hal-hal fisik dan terukur. Alternatif model komunikasi yang diusulkan adalah komunikasi dialogis antar orang yang terlibat dalam proses pembangunan.

3.2 Pemberdayaan

Bowling dan Barbara (2002) mengemukakan bahwa program penyuluhan dapat membentuk perubahan perilaku melalui berbagai prinsip pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat. Bersama-sama masyarakat dapat dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada pembentukan perilaku masyarakat. Pemberdayaan sebagai sebuah korban mempunyai makna bahwa

pemberdayaan merupakan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu tertentu. Dalam studi ini pelaksanaan program pemberdayaan dibatasi waktu, sehinggatampak sebagai kegiatan keproyekan. Kondisi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi pelaksana program maupun komunitas target, karena sering terjadi kegiatan terputus di tengah jalan, dan kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlihat dalam program.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, peran komunikasi pembangunan sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam menghadapi modernisasi. Seperti telah dikemukakan oleh Van den ban dan Hawkens (1999) bahwa peranan berbagai program penyuluhan sebagai implementasi komunikasi pembangunan adalah dengan membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan tersebut. Upaya pemberdayaan nelayan kecil menurut Satria (2001) perlu memahami struktur sosial masyarakat nelayan, tidak hanya melihat aspek ekonomi atau teknologi saja, melainkan juga aspek sosial budaya perlu diperhatikan, sehingga program tidak lagi hanya bersifat "ingin sepat selesai".

4. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di 2 (dua) wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Seribu yakni Kelurahan Pulau Tidung dan Pulau Panggang. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2011-2012. Responden penelitian adalah pelaku utama dalam usaha penangkapan, pengolahan, pembudidayaan dan pemasar.

Tabel 1
Responden Penelitian di Kelurahan Pulau Tidung dan Pulau Panggang

Kelurahan/Pulau	Luas (m ²)	RTP	Jumlah Benih (ekor)
Pulau Tidung	23	3.020	49.540
Pulau Panggang	138	5.886	20.922

Sumber : Kepulauan Seribu dalam Angka Tahun 2013

Data primer yang diperoleh dari responden meliputi (1) keragaman sosial ekonomi responden penelitian; (2) informasi tentang SDP terutama masalah penurunan kualitas SDP meliputi jenis ikan hasil tangkapan, kualitas terumbu karang dan kondisi pantai; (3) program pemberdayaan dan atau intervensi yang pernah berlangsung, hasil yang dicapai dan kontinuitas program; (4) Kompetensi komunikasi penyuluh /fasilitator program pemberdayaan; (5)

Kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan. Selain dari responden, data diperoleh pula dari sumber sekunder yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kantor Kecamatan, Badan Pusat Statistik (BPS), literatur dan media. Paduan metode wawancara semi terstruktur, pengamatan, dan diskusi dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi selama penelitian.

Datadialisis secara deskriptif dengan menerapkan konsep *Checkland* (1984) tentang *soft system methodology* (SSM). Di dalam SSM dikemukakan bahwa untuk mendinamiskan aktivitas manusia sebagai sebuah sistem, perlu adanya desain konsep tentang CATWOE. CATWOE merupakan singkatan dari *Customers (C) Actors (A), Transformation (T), Welstanchaung (W) Owner (O) dan Enviroment (E)*. Konsep CATWOE digunakan menganalisis peran para pihak dalam pengembangan strategi komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

5. Hasil Penelitian

5.1 Wilayah dan Gambaran Masyarakat Pesisir di Lokasi Penelitian

Kepulauan Seribu yang terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta merupakan suatu wilayah dengan karakteristik dan potensi alam yang berbeda dengan wilayah DKI Jakarta lainnya, hal ini dikarenakan wilayah ini pada dasarnya merupakan gugusan pulau-pulau terumbu karang yang terbentuk dan dibentuk oleh biota koral dan asosiasinya dengan bantuan proses dinamika alam. Kepulauan Seribu berbatasan dengan Sebelah Utara : Laut Jawa, Sebelah Selatan : Jakarta Utara dan Tangerang, Sebelah Timur : Laut Jawa, Sebelah Barat : Laut Jawa dan Selat Sunda.

Data demografi pada wilayah penelitian tahun 2012 menunjukkan jumlah penduduk sebesar 19.817 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Pulau Kelapa yaitu sebesar 6.509 jiwa. Komposisi penduduk laki-laki sebesar 7.931 jiwa dan perempuan 9.753 jiwa, dengan komposisi tersebut *sex ratio* sebesar 413. Penyerapan tenaga kerja per lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Seribu pada tahun 2009-2012 pada nelayan / Petani.

Struktur perekonomian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara menyeluruh di dominasi oleh sektor pertambangan. Hal tersebut diperlihatkan melalui kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Seribu adalah yang terbesar dimana sumber mineral yang dihasilkan berupa minyak bumi dan gas dari pulau Pabelokan.

Berdasarkan data distribusi umur penduduk, terlihat bahwa komposisi penduduk Kecamatan Kepulauan Seribu banyak yang masuk kedalam usia produktif dimana dalam 100 orang yang termasuk kedalam umur produktif dan menanggung 74 ± 75 orang yang termasuk kedalam usia tidak produktif.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu yang matapencariaannya masih didominasi oleh

nelayan memiliki tingkat pendidikan yang tergolong sangat rendah. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikannya yang 2.063 orang merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD) dan tamatan Sekolah Menengah Pertama SMP sebesar 2.329 orang. Guna mengantisipasi hal tersebut, strategi komunikasi pembangunan perikanan dan kelautan harus berfokus pada peningkatan kemampuan nelayan dalam pengelolaan keuangan, dan yang paling urgen adalah perubahan sikap dan perilaku yang positif memanfaatkan kekayaan bahari.

Kegiatan nelayan di Kelurahan Pulau Tidung dan Panggang adalah melakukan penangkapan ikan. Nelayan memiliki karakteristik pendapatan yang sangat fluktuatif. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh oleh nelayan sangat bergantung pada kondisi alam. Disamping itu pula pada nelayan perikanan budidaya, keterampilan dan pengetahuan nelayan mengenai teknik budidaya sangat berpengaruh pada pendapatan yang mereka peroleh disetiap panen yang mereka lakukan. Nelayan membutuhkan pendampingan dalam hal pemasaran hasil, pemeliharaan terumbu karang, kawasan pesisir, dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan. Proses-proses komunikasi pembangunan yang saat ini berlangsung masih terlalu berfokus pada sosialisasi informasi tentang program kerja dan prioritas pemerintah belum mengarah pada terobosan pendayagunaan saluran dan media komunikasi lokal untuk memperkuat jaringan sosial masyarakat pesisir.

5.2 Peran Strategi Komunikasi Pembangunan dalam menjembatani Kesenjangan

Menghadapi permasalahan masyarakat pesisir di lokasi kajian, maka dalam aplikasinya di lapangan, dapat dikomunikasikan program berikut:

- Peningkatan keterampilan nelayan dan keluarganya dalam mengelola hasil tangkapan, memperbaiki sikap yang merusak lingkungan dengan mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya alam;
- Peningkatan kemampuan manajemen usaha penangkapan dan diversifikasi usaha yang disertai penguatan ekonomi keluarga melalui usahaproduktif;
- Penguatan kelembagaan lokal termasuk organisasi pemasaran hasil perikanan;
- Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan mengedepankan prinsip

sustainability(sumberdaya alam)dan kesejahteraanmasya- rakat;dan

- e) Membangun jejaring (*network*)denganmitra usaha guna memperbesar armada dan menggunakan alat tangkap yang lebih efektif dan tidak merusak lingkungan.

Dengan demikian, pesan-pesan atau materi dalam komunikapembangunan masyarakat pesisir tidak sekedar mentransferkan informasi saja, tetapi menyangkut aspek transformasi keadaan dari kondisi sekarang yakni nelayan dan keluarganya yang masih terpinggirkan, menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Komunikasi pembangunan dapat memainkan peran dalam perubahan berencana, sebagai-mana dikemukakan pula oleh S.C. Dube (1976), bahwa dalam pembangunan di India, komunikasi memegang peran nyata dalam mengembangkan media untuk memobilisasi masyarakat dan pemerintahnya.

Secatinya, dalam kaitan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM), Nikijuluw (2002) menyebutkan bahwa di beberapa daerah di Indonesia seperti Maluku, dalam menangkap ikan hanya menggunakan alat tangkap sederhana. Sedangkan di Irian Jaya menurut Nikijuluw (2002) menerapkan aturan bahwa jika penduduk suatu suku ingin menangkap ikan di perairan yang menjadi wilayah suku lain, maka teknologi yang digunakan harus sama. Kehadiran alat tangkap modern, cenderung mendesak nelayan kecil untuk meninggalkan daerahnya dan keluar dari perairan daerah asalnya, sehingga seringkali menimbulkan konflik antara nelayan satu dengan lain karena perebutan *fishing ground* dan penggunaan teknologi yang berbeda. Atas dasar pemikiran ini, maka sebenarnya peran program komunikasi pembangunan sangat luas mulai dari sekedar pentransferan informasi dan teknologi, pemberdayaan hingga peningkatan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya lain (*able to understand*).

5.3Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat Pesisir

Pelaksanaan program pemberdayaan di lokasi penelitian hingga tahun2000-an masih belum berorientasi pada pengutamaan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2011 secara lebih intensif diterapkan pendekatan yang mengutamakan penyelesaian persoalan masyarakat (*problem solving*) dan berpusat pada kebutuhan masyarakat (*people centered development*). Pendapat masyarakat pesisir

penyuluhan/pemberdayaan masyarakat dirangkum pada Tabel 4.Contoh kasus: pendekatan berpusat pada nelayan diterapkan pada program rehabilitasi karang sebagai salah satu pilihan atas solusi persoalan degradasi lingkungan. Selain itu, dikembangkan usaha penangkapan ikan hias yang ramah lingkunganuntuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui peng- gunaan jaring khusus (*stable net*).

Komunikasi pembangunan harus diselenggarakan secara partisipatif, sebab pendekatan ini memudahkan *agent of change* membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya. Komunikasi pembangunan dapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, yang dalam kegiatannya berkaitan dengan orang dewasa. Implikasi hal ini, pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran orang dewasa (*adult learningapproach*) dalam persiapan dan penyelenggaraan perlu dipusatkan dalam kebutuhan nyata peserta proses belajar (Amanah 1996) atau lebih dikenal dengan *learner-centred approaches*. Orang dewasa merupakan orang yang sudah kaya pengalaman sebagaimana dikemukakan oleh (Simpson 1993) sehingga perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- Pembelajaran orang dewasa didasarkan pada pengalaman masa lalu dan patut dihargai
- Pengalaman masa lampau tersebut harus dihargai oleh peserta lainnya dan harus diupayakan diterapkan dalam proses belajar. Pembelajaran yang melibatkan transformasi pengalaman masa lalu mem- butuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar dibandingkan model belajar lainnya.
- Lingkungan mempengaruhi kemam- puan orang dewasa dalam belajar. Lingkungan terbaik seperti kondisi yang mengurangi gangguan pada orang dewasa yang sedang belajar akan memberikan dukungan yang berharga. Peserta dewasa akan belajar dengan baik di lokasinya sendiri. Orang dewasa tidak akan efektif jika belajar di bawah tekanan atau waktu yang dibatasi. Mereka tidak suka membuang waktu, dan orang dewasa lebih tertarik padaa proses belajar yang memberikan hasil nyata yang nyata dan cepat.
- Orang dewasa akan belajar bahan atau materi yang dia perlukan (selektif).
- Orang dewasa dapat didorong untuk belajar pada materi yang relevan pada peran dan kehidupannya saat ini.
- Orang dewasa belajar untuk kehidupannya dan untuk mereka yang terlibat dalam kelompoknya.

Prinsip partisipasi dalam komunikasi pembangunan bukan sebatas proses sekedar hadir, memberikan pendapat atau hanya berdasarkan persepsi pemerintah atau penyuluh sendiri.. Sangat rasional, jika masyarakat pesisir belum mau terlibat dalam berbagai program pembangunan khususnya kegiatan penyuluhan karena sejak awal masyarakat tidak terlibat dalam menentukan kegiatan yang diprogramkan. Terkait dengan hal ini, proses aksi sosial dan proses pengambilan keputusan dalam model adopsi inovasi Rogers (1994) dapat dimodifikasi. Proses aksi social meliputi lima tahap: (1) stimulasi minat (*stimulation of interest*) yaitu inisiatif dalam komunitas mulai berkembang pada tahap awal dalam ide baru dan praktek; (2) inisiasi (*initiation*) yaitu kelompok yang besar mempertimbangkan ide

baru atau praktek, dan alternatif dalam

terhadap ide tersebut, (3) keputusan (*decision*) adalah individu membuat keputusan awal untuk mengadopsi atau tidak ide tersebut; (4) implementasi (*implementation*) adalah individu mencoba ide atau cara baru tersebut untuk pertama kali; dan (5) konfirmasi (*confirmation*) adalah individu memutuskan menerapkan ide atau cara baru secara berulang dan dapat disertai modifikasi. Menumbuhkan kebanggaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah pesisir tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi isu yang dihadapi saja, tetapi perlu diwujudkan beberapa aspek yaitu adanya aspek situasional, kolaborasi dan evaluasi diri dari setiap unsur yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. *Agent of change* seyogyanya mampu mengembangkan empat aspek (Kemmis dan McTaggart 1988), yaitu:

- a) Suatu kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kebersamaan dalam kelompok masyarakat dan rasa memiliki problem yang tengah

Tabel 4. Pendapat Masyarakat Pesisir tentang Penyuluhan/Program Pemberdayaan di Lokasi Penelitian , 2012

No	Uraian	Kelurahan Pulau Tidung			Kelurahan Pulau Panggang		
		S (%)	TS (%)	Total (%)	S (%)	TS (%)	Total (%)
1	Metode partisipatori bermanfaat	85	15	100	90	10	100
2	Proses komunikasi harus berorientasi kepada perubahan perilaku	85	15	100	80	20	100
3	Harus bekerjasama dengan penyuluh	100	0	100	100	0	100
4	Prioritas kebutuhan nelayan diperhatikan	100	0	100	100	0	100
5	Perlu dukungan mitra usaha	100	0	100	100	0	100
6	Dukungan pemerintah dan swasta	100	0	100	90	10	100
7	Peran lembaga lokal dalam pemberdayaan	90	10	100	85	15	100

Keterangan : T = Setuju; TS : Tidak Setuju

implementasi; (3) legitimasi (*legitimation*) merupakan tahap saat pimpinan komunitas memutuskan akan meneruskan tindakan atau tidak; (4) keputusan bertindak adalah rencana spesifik tindakan mulai dibangun; dan (5) aksi yaitu penerapan rencana (Donnermeyer *et al.* 1997). Model adopsi inovasi Rogers meliputi lima tahap: (1) pengetahuan (*knowledge*) seseorang menjadi sadar akan adanya ide atau cara baru; (2) persuasi (*persuasion*) yaitu individu mulai mengembangkan sikap suka atau tidak suka

Dihadapi

- b) Adanya kemampuan berkreasi dan pemikiran yang kritis;
- c) Program yang dilaksanakan adalah untuk tujuan perbaikan dan pengembangan; dan
- d) Kemampuan memfasilitasi masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah. Keterlibatan masyarakat dalam program-program pengembangan dan proyek pembangunan dapat digolongkan kedalam tujuh tipe (Adnan *et al.*,

Tabel 5. Tipologi Partisipasi Masyarakat menurut Adnan *et al.* (Pretty 1995)

No	Tipologi	Karakteristik
1	Partisipasi Pasif	Masyarakat hanya berpartisipasi karena diperintah
2	Partisipasi dalam memberikan informasi	Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab kuesioner atau dalam wawancara tertentu
3	Partisipasi melalui konsultasi	Masyarakat berpartisipasi dalam proses konsultasi. Agen pembaharuan berperan dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya.
4	Partisipasi dalam menyediakan materi penting dalam program/proyek	Masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan sumberdaya seperti tenaga kerja, uang tunai, bahan pangan dsb.
5	Partisipasi Fungsional	Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok yang bekerja untuk pengembangan organisasi setempat. Lembaga masyarakat ini masih bergantung sepenuhnya kepada fasilitator.
6	Partisipasi Interaktif	Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama, guna menyusun rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan guna memperkokoh kelembagaan yang telah dibentuk.
7	Mobilisasi diri	Masyarakat berpartisipasi dengan berinisiatif untuk mengubah sistem, bebas dari pengaruh institusi luar. Masyarakat bebas mengadakan kontak dengan dunia luar dalam rangka pengembangan sumberdaya dan saran-saran teknis yang dibutuhkan.

Sumber : Adnan *et al.* (dalam Pretty JN. 1995:173)

dalam Pretty 1995:173), seperti tampak pada Tabel 5. Para pihak terkait dengan program komunikasi pembangunan perlu mengetahui tipe partisipasi masyarakatnya, sehingga dapat mengembangkan pendekatan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya. Idealnya, masyarakat memiliki tipologi keenam dan ketujuh. Meskipun demikian, jika masyarakat sudah berada pada tipologi kelima itu sudah bagus karena sudah ada langkah maju untuk berinisiatif membentuk dan mengembangkan organisasi di lingkungan mereka sendiri. Hal ini dapat dibanding dengan hasil penelitian Douglah and Sicilima di Tanzania (1997) tentang pelibatan masyarakat dalam dua pendekatan penyuluhan yaitu Latihan dan Kunjungan dan Sasakawa Global 2000.

Partisipasi pada kedua pendekatan belum menerapkan pendekatan partisipasi yang berimbang. Partisipasi masih ditekankan hanya pada pelaksanaan ketimbang pelibatan petani saat perencanaan dan evaluasi program. Tampak bahwa prinsip partisipasi bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Penerapan metode partisipasi memerlukan proses yang bertahap. Penumbuhan partisipasi perlu dimulai dengan fasilitasi pada masyarakat pesisir tentang pentingnya keterlibatan yang bersangkutan pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus untuk memperbaiki hidup dan kehidupan. Pada tahap awal bentuk partisipasi bisa berupa pemanfaatan hasil-hasil penyuluhan (inovasi), lalu partisipasi akan lebih intensif secara bertahap, hingga akhirnya masyarakat mampu mandiri untuk mengelola kegiatannya dengan mobilisasi diri.

5.4 Stakeholders dalam Komunikasi Masyarakat Pesisir yang Pembangunan

Masyarakat pesisir merupakan sistem sosial, sehingga framework CATWOE ini relevan dengan proses transformasi masyarakat pesisir ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pihak terkait yang dapat komunikasi pembangunan berorientasi pemberdayaan meliputi

- Customers*: Masyarakat pesisir termasuk nelayan dan anggota keluarganya,
- Actors*: Pemuka masyarakat, agen pembaharu, penyuluh, ketua dan anggota kelompok nelayan,
- Transformation*: proses perubahan berupa proses komunikasi pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan martabat masyarakat pesisir, seperti kegiatan penguatan kelembagaan lokal (seperti lembaga pemasaran, kelompok nelayan), pengembangan kapasitas sumberdaya manusia setempat, pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan terpadu dan lain-lain
- Welstanchaung = worldview*: pemahaman terhadap cara pandang, nilai-nilai lokal yang dianut oleh masyarakat pesisir, dan dihargai sebagai aset masyarakat setempat. Di wilayah penelitian, masing-masing kelompok nelayan memiliki *awig-awig* (peraturan yang dikelola oleh komunitas lokal dan didasarkan pada adat istiadat dan budaya Bali) sangat ditaati oleh nelayan dan masyarakat pesisir setempat.
- Owners*: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pemerintahan desa dan kecamatan dan instansi terkait lainnya yang

Created with

berfungsi mengembangkan masyarakat setempat

- f) *Environment*: kondisi lingkungan setempat perlu diperhatikan seperti kebijakan lokal apakah mendukung atau tidak terhadap program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sebagai sebuah sistem sosial, masyarakat pesisir tentunya memiliki struktur sosial tertentu, dan dikenalnya status dan peran pada tiap anggota masyarakat. Strategi komunikasi pembangunan pada masyarakat bersifat spesifik untuk tiap wilayah, setiap upaya perubahan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti masalah sosial ekonomi, kondisi fisik lingkungan (sumberdaya alam), dan sumberdaya manusia secara umum (termasuk agen pembaharu). Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi pembangunan berubah-ubah dan harus diantisipasi secepatnya. Perubahan merupakan proses alamiah yang tidak bisa dihindari, dan harus terjadi pada sesuatu, individu atau masyarakat sebagai reaksi atau adaptasi pada kondisi yang dihadapi. Proses perubahan pada masyarakat pesisir dalam konteks perubahan sosial ke arah yang lebih baik berkaitan dengan transformasi struktur dan interaksi sosial dari sebuah masyarakat (Horton dan Hunt, dalam Garcia 1985) dan merupakan variasi atau modifikasi dalam pola organisasi sosial atau sub kelompok dalam masyarakat atau pada keseluruhan masyarakat itu sendiri (Panopio, Cordero, dan Raymund, dalam Garcia 1985). Dengan demikian, kendala-kendala yang dihadapi dan masalah yang timbul di antaranya adalah adanya keinginan untuk mempertahankan *status quo (reluctant to change)* oleh sekelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi proses perubahan. Sebagai mana diketahui, dalam teori adopsi inovasi ada tahapan yang dilalui jika suatu ide baru diterapkan dan proses itu merupakan proses mental. Setiap tahap akan memerlukan waktu, pemikiran dan respon yang berlainan (*awareness, interest evaluation, trial*, dan keputusan apakah menolak ataukah menerima inovasi (pembaharuan – ide atau teknologi baru). Guna mengantisipasi hal ini, maka sangat relevan bagi agen pembaharu untuk menerapkan pendekatan penyuluhan yang tepat sesuai dengan tahapan komunikasi yang sedang berlangsung di masyarakat.

Terdapat tiga pilihan metode pendekatan atau kombinasi ketiganya yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, yaitu:

- Pendekatan perorangan, misalnya kegiatan kunjungan perorangan, konsultasi ke rumah, penggunaan surat atau telepon, dan magang.
- Pendekatan kelompok, misalnya kursus tani-nelayan, demonstrasi cara atau hasil, kunjungan kelompok, karyawisata, diskusi kelompok, ceramah, pertunjukan film, slide, karyawisata, penyebaran brosur, buletin, folder,

liputan, asah terampil, sarasehan, rembug utama atau madya, temu wicara, temu usaha, temu karya, temu lapang.

- Pendekatan massal seperti pameran, Pekan Nasional (Penas), Pekan Daerah (Peda), pertunjukkan film atau wayang, drama, penyebaran pesan melalui siaran radio, televisi, surat kabar, selebaran atau majalah, pemasangan poster atau spanduk dan sebagainya

Daftar Pustaa

- Adnan, S. Barrett A, Nurul Alam S M and Brustinow, A. 1995. People's Participation. NGOs and the Flood Action Plan. Dalam J. N. Pretty. Regenerating Agriculture. London: Earthscan Publication Ltd.
- Amanah, S. 1996. A Learner-Centred Approach to Improve Teaching and Learning Process in Agricultural Polytechnic in Indonesia. Thesis. Australia: University of Western Sydney.
- Amanah, S., Fatchiya, A. dan Dewi, S. 2004. Pemodelan Penyuluhan Perikanan Pada Masyarakat Pesisir Secara Partisipatif. Laporan Penelitian Hibah Bersaing X. IPB, Bogor.
- Amanah, S. dan Yulianto, G. 2002. Profil Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Menunjang Kinerja DKP di Era Globalisasi. Jakarta: STP (dulu AUP).
- Bowling, Chester J., dan Barbara A. Brahm. 2002. Shaping Communities through Extension Programs. Journal of Extension, June 2002 Volume 40 Number 3.
- Badan Pusat Statistik 2012 Kabupaten Kepulauan Seribu dalam Angka.
- Dahuri, R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran DR. Ir. Rokhmin Dahuri, MS). Jakarta: LISPI (Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pesisir, Pantai dan Pulau- Pulau Kecil, Dep. Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Seribu . 2012. Data Perikanan Kabupaten Seribu Tahun 2012.
- Direktur Jenderal Perikanan, 2000. Visi dan Misi Pembangunan Perikanan. Jakarta: Dep. Perikanan dan Ilmu Kelautan.
- Donnermeyer, Joseph F., Barbara A. Pleded, Ruth W. Edwards, Gene Oetting, dan Lawrence Littlethunder. 1997. "Community Readiness and Prevention Programs." Journal of the Community Development Society, Vol. 28. No.1: 65-83.
- Douglass, M dan Sicilima, N. 1997. A Comparative Study of farmers' Participation in Two Agricultural Extension Approaches in Tanzania. Journal of International

Created with

- Garcia, M.B. 1985. *Sociology of Development: Perspective and Issues*. Philippines: National Book Store, Inc.
- Hanson, A
- Hanson, A.J. 1984. *Coastal Community: International Perspectives*. Paper Presented at the 26 th Annual Meeting of The Canadian Commission for UNESCO, St John's Newfoundland, 6 th June 1984.
- Harris, Elayne M. 1996. *The Role of Participatory Development Communication as a Tool of Grassroots Nonformal Education: Workshop Report*. Dalam Guy Bessette and C.V. Rajasundaram (Editor). *Participatory Development Communication: A West African Agenda*. The International Development Research Centre: Science for Humanity.
- Kemmis, Stephen dan MacTaggart, Robin. 1988. *The Action Research Planner*. Melbourne: Deakin University Press.
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PTR Raja Grafindo Persada.
- Nikijuluw, Victor. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Kerjasama Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) dengan PTPustaka Cidesindo.
- Pretty, J. N. 1995. *Regenerating Agriculture*. London: Earthscan Publication.
- Rogers, Everett M. 1994. *The Diffusion Process*. Edisi Keempat. New York: The Free Press.
- Satria, A. 2000. *Dinamika Modernisasi Perikanan, Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Humaniora Utama Press, Bandung.
- _____. 2001. *Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- McTaggart (eds). *The Action Research Reader*. Victoria, Melbourne: Deakin University Press.
- Simpson, I. 1993. *Rural Extension – A Change in Emphasis*. Proceedings of the Workshop: Defining/redefining Extension Practice Science Leaders' Group. Goulburn: NSW Agriculture.
- VandenBan, A.W. dan HS. Hawkins, 1999. *Agricultural Extension*. London: Elsevier.
- Waskita, Djaka. 2005. *Komunikasi Pembangunan untuk Pemberdayaan*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Vol 1. No.1, September